



**DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BONE**

LKjIP 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmd.bone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategik (RENSTRA) Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas.

Komitmen dalam penyusunan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.





Cakupan LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti: latar belakang, maksud dan tujuan, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun aspek Perencana dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022, termasuk analisa efesiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komperhensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good government pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKjIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Masyarakat dan Desa Tahun 2022 ini, dapat menjadikan masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 13 Februari 2023
Kepala Dinas PMD Kab. Bone



Drs. A. GUNADIL UKRA, MM
NIP.19671006 199301 1 010





LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR i



DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi

BAB I PENDAHULUAN 1



A. UMUM	2
B. ORGANISASI	3
C. ISU STRATEGIS	7
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	8



BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. TUJUAN & SASARAN	11
B. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN	12
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
D. PERJANJIAN KINERJA	15
E. STANDAR PENILAIAN KINERJA	17





LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
B. REALISASI ANGGARAN	62



LAMPIRAN	64
-----------------	-----------



BAB IV PENUTUP	64
-----------------------	-----------





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022	16
Tabel 2.4	Standar Penilaian Kinerja	17
Tabel 2.5	Skala Predikat SAKIP	18
Tabel 3.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	21
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023	23
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Jangka Menengah Renstra 2018-2023	25
Tabel 3.4	Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya	27
Tabel 3.5	Perbandingan Indikator Kinerja Kabupaten/Kota	28
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Keberhasilan dan Kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022	31
Tabel 3.7	Efisiensi Sumber Daya Kinerja dan Anggaran	38
Tabel 3.8	Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	40
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran	62





DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1	Tugas Pokok Dinas PMD	4
Gambar 1.2	Fungsi Dinas PMD	4
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Dinas PMD	5
Gambar 1.4	Sumber Daya SDM Dinas PMD	6
Gambar 1.5	Isu Strategis Dinas PMD	7
Gambar 2.1	Strategis Dinas PMD	12
Gambar 2.2	Arah Kebijakan Dinas PMD	13
Gambar 3.1	Tujuan/Sasaran Dinas PMD	20





BAB I

PENDAHULUAN

- A. UMUM**
- B. ORGANISASI**
- C. ISU STRATEGIS**
- D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmd.bone.go.id



A. UMUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga dimaksudkan sebagai perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis suatu Instansi. Disinilah esensi Dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dilaksanakan berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta secara teknis Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasar pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Isntansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan dalam



capaian sasaran strategis, yang diukur berdasarkan Indikator kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Perubahan 2018 – 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, khususnya Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Tujuan dari pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kab. Bone Tahun 2022 untuk Meningkatkan kualitas akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone, Meningkatkan Komitmen dan Kerja sama yang baik dengan instansi terkait maupun para pemangku kepentingan (stakeholders) mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja dan evaluasi kinerja serta memberikan informasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2022 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

B. ORGANISASI

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu sebagai berikut:



1 Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Gambar 1.1 Tugas Pokok Dinas PMD

TUGAS POKOK

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok yaitu membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

2 Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi :

Gambar 1.2 Fungsi Dinas PMD

01

Perumusan Kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

02

Pelaksanaan Kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

03

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

04

Pelaksanaan Administrasi Dinas

05

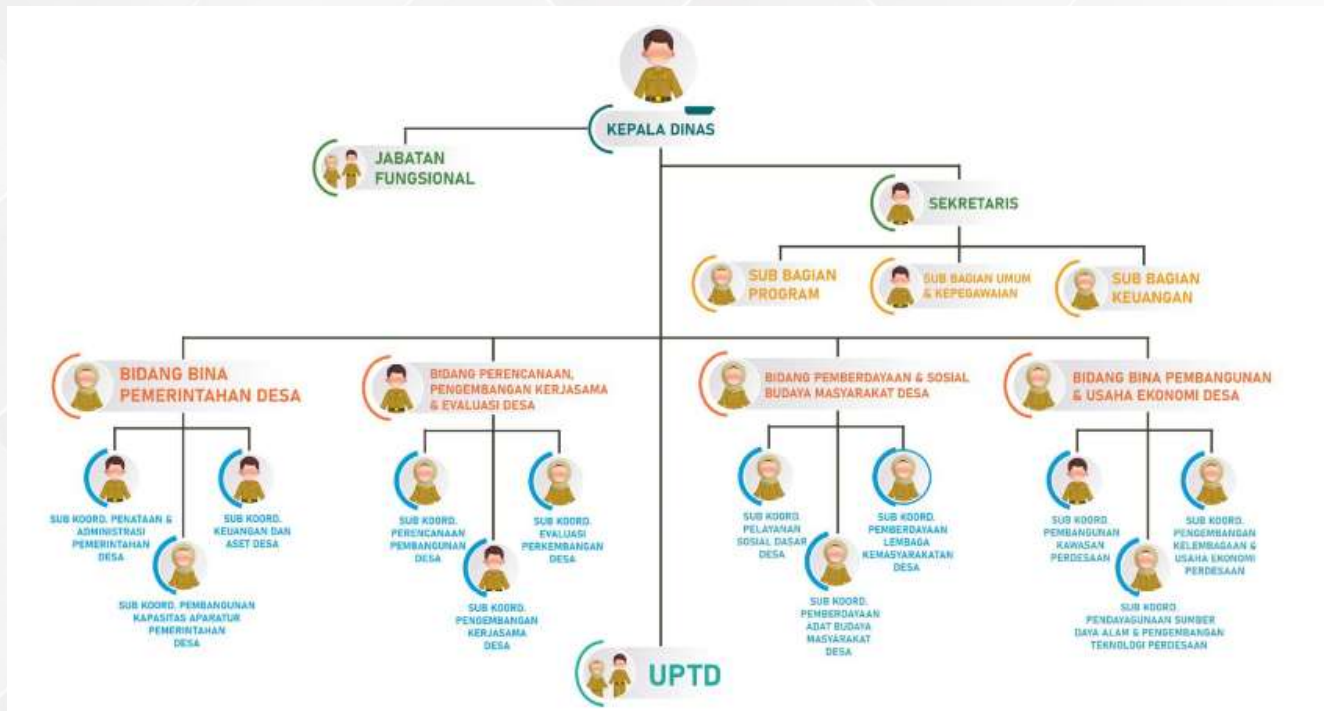
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.3 Struktur Organisasi Dinas PMD



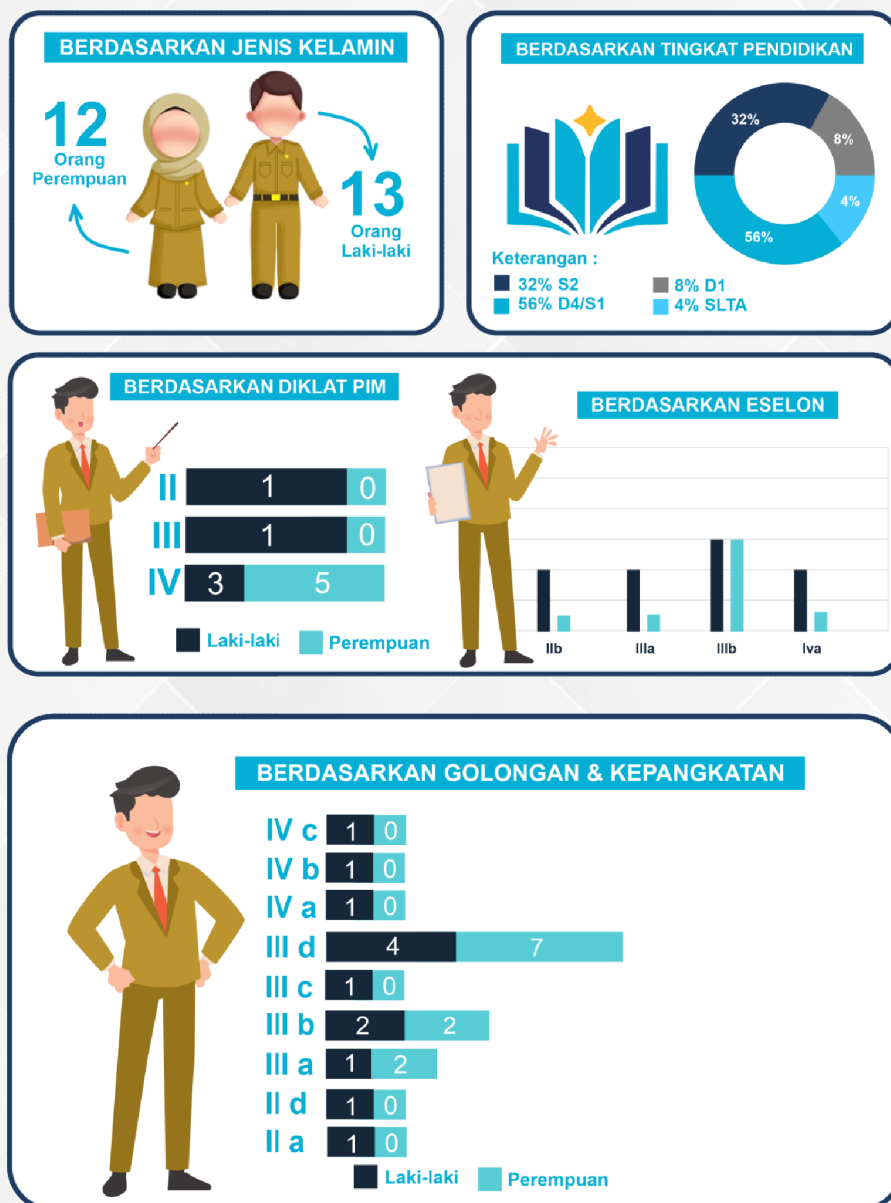
Sumber Data : Peraturan Bupati No.78 Tahun 2021



Untuk melihat dokumen Peraturan Bupati No.78 Tahun 2021 silahkan memindai Kode QR di samping

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia/ Aparatur dari berbagai macam latar belakang keahlian dan pendidikan. Keberadaan Sumber Daya Manusia / Aparatur menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Sumber Daya Manusia / Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

Gambar 1.4 Sumber Daya Manusia Dinas PMD Kab. Bone



Sumber Data :DUK DPMD Kab. Bone Tahun 2022

Berdasarkan gambar 1.4, tingkat pendidikan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone di dominasi oleh Sarjana, hal ini terlihat dari banyaknya jumlah pegawai yang berijazah Sarjana yakni, sebanyak 14 orang yang berijazah S1 dan 8 orang yang berijazah S2.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone sebanyak 25 orang, terdiri dari 13 orang laki-laki dan 12 orang perempuan, dimana jumlah pegawai terbanyak berdasarkan pangkat dan golongan terbanyak pada golongan III/d dan masing-masing 1 orang yang terdapat dalam golongan IV/c, IV/b, II/d, dan II/a.

Berdasarkan DIKLAT PIM Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone didominasi oleh Diklat PIM IV yang terdiri dari 3 orang laki-laki dan 5 orang perempuan.

Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone yang bereselon sebanyak 15 orang, terdiri dari 1 orang Eselon II b (Kepala Dinas), 1 orang Eselon III a (Sekretaris), 4 orang Eselon III b (Kepala Bidang), dan 1 orang Eselon IV a Kepala Sub Bagian.

C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2018-2023 adalah :

Gambar 1.5 Isu Strategis Dinas PMD Kab. Bone

**Kurang
berfungsinya
lembaga dan
organisasi
masyarakat
perdesaan**

**Kurang
memadainya
kondisi
infrastruktur desa**

**Menurunnya nilai
– nilai sosial
masyarakat dan
penghargaan
terhadap adat dan
istiadat budaya
lokal**

**Masih lemahnya
peran serta
perempuan
perdesaan dalam
kehidupan sosial
kemasyarakatan
dan berpartisipasi
dalam
pembangunan**



Belum optimalnya lembaga ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Kurang optimalnya pengelolaan sumber daya desa, potensi desa dan teknologi tepat guna serta lingkungan hidup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik

D.

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik Desa yang harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas, transparan, profesional, efektif, dan efisien, agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.

Pengelolaan keuangan Desa diharapkan dapat mengikuti perkembangan teknologi pada era digitalisi. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa ini sejalan dengan peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang memberikan ruang bahwa teknologi informasi merupakan salah satu sarana atau piranti yang dapat digunakan dalam pengolahan laporan dengan



mendayagunakan keahlian (brainware), piranti lunak (software), dan piranti keras (hardware) yang dioperasikan dengan prosedur tertentu.

Dalam upaya mengawal transparansi pengelolaan keuangan Desa berbasis teknologi tersebut, Pemerintah Desa difasilitasi sebuah aplikasi yang diberi nama Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini diharapkan memberikan kemudahan bagi aparatur Desa khususnya kaur keuangan dalam menyusun perencanaan keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa secara tepat waktu.

Di Kabupaten Bone sendiri, seluruh pemerintah Desa sudah mengimplementasikan Aplikasi Siskeudes sejak tahun 2018, namun dalam pelaksanaannya masih banyak kendala dan hambatan yang dihadapi. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan pemerintah Desa saat ini masih sistem offline. Hasil inputan realisasi keuangan desa pada Siskeudes offline tidak bisa dilihat secara realtime. Database siskeudes masih harus disampaikan secara manual ke Admin Siskeudes yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dikompilasi atau digabung. Hal ini menyebabkan Kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas PMD menyusun laporan ikhtisar keuangan desa baik dilaporan semester pertama maupun dilaporan akhir tahun sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 69 dan 71 belum bisa terpenuhi secara tepat waktu disebabkan karena masih banyak Desa yang terlambat menyampaikan laporannya.



LAPORAN KINERJA

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN & SASARAN

B. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

C. INDIKATOR KINERJA UMUM

D. PERJANJIAN KINERJA

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmd.bone.go.id



A. TUJUAN & SASARAN

Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone dan kaitannya dengan misi Kabupaten Bone yaitu tertuang pada matriks dibawah ini:

Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja Pada Tahun ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Maju dan Mandiri			31	39	47
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata – rata IKS			0,7262	0,7282	0,7302
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata – rata IKE			0,5457	0,5477	0,5497
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata – rata IKL			0,6618	0,6638	0,6658
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip Oleh APIP			B	BB	BB

Sumber Data: RenstraDinas PMD Kabupaten Bone 2018-2023



B. STRATEGI & ARAH KEBIJAKAN

1 Strategi

Strategi adalah suatu rencana untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun sedemikian rupa oleh suatu organisasi sesuai dengan misi yang hendak diraihinya sekaligus untuk melaksanakan mandat/tugas-tugas yang diembannya dengan mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Adalah Sebagai Berikut:

Gambar 2.1 Strategi Dinas PMD



2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Adalah Sebagai Berikut:

Gambar 2.2 Arah Kebijakan Dinas PMD





C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.



KEPADA
MUHTAR, SP
KEPALA DESA PALAKKA
KECAMATAN KAHULU KABUPATEN BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
ATAS KOMPEN DAN KERJA KERAS
DALAM MEWUJUDKAN

DESA MANDIRI

JAKARTA, 04 NOVEMBER 2022

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA



Abdul Halim Iskandar
Drs. H. ABDUL HALIM ISKANDAR, M.Pd.



**Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata – rata IKL			0,6618	0,6638	0,6658
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata – rata IKS			0,7262	0,7282	0,7302
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata – rata IKE			0,5457	0,5477	0,5497
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip Oleh APIP			B	BB	BB

Sumber Data:Perbup No. 101 Tahun 2021

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.



Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata – rata IKS	0,7282	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 2.799.414.325
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 147.613.040
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata – rata IKE	0,5477	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 331.817.900
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 400.524.704
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata – rata IKL	0,6638	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 187.729.900
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 126.382.530
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip Oleh APIP	BB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.540.980.480
Jumlah				Rp. 13.534.462.879

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas PMD



Untuk melihat dokumen perjanjian kinerja DPMD Tahun 2022 silahkan memindai Kode QR di samping



E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.4 Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat Tercapai/Sangat Berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup Tercapai/Cukup Berhasil
$X < 60$	Tidak Tercapai/Tidak Berhasil

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Adapun Skala yang digunakan terkait dengan perhitungan capaian



kinerja evaluasi SAKIP, berdasarkan tingkatan yang diatur dalam permenpan 12 Tahun 2015, yang terdiri:

Tabel 2.5 Skala Predikat SAKIP

Keterangan	Skor
AA (Sangat Memuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6 (Enam)
BB (Sangat Baik)	5 (Lima)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (Dua)
D (Sangat Kurang)	1 (Satu)



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmd.bone.go.id



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pengukuran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja setiap indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja di atas mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi:

Gambar 3.1 Tujuan/Sasaran Dinas PMD Kab.Bone





1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Ket.
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata – rata IKS	0,7282	0,7711	106%	Berhasil
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata – rata IKE	0,5477	0,6380	116%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata – rata IKL	0,6638	0,7732	116%	Sangat Berhasil
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip oleh APIP	BB (70-80)	A	104%	Berhasil
Rata-rata				110%	Sangat Berhasil

Sumber Data: Data di olah oleh Dinas PMD Tahun 2023



Untuk melihat dokumen IKU Tahun 2022
Silahkan memindai kodeQR di samping



Berdasarkan data di atas, rata – rata keberhasilan capaian target sasaran strategis dari setiap indikator sebesar 110%

Pada sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa dengan indikator Nilai rata - rata IKS sebesar 0,7282, realisasi sebesar 0,7711, capaian 106 % dengan kategori berhasil. Formulasi perhitungan adalah Jumlah Nilai IKS Desa dibagi jumlah Desa. Jumlah nilai IKS Desa sebesar 32,31 dan jumlah Desa sebesar 328 Desa.

Pada sasaran Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD dengan indikator Nilai rata - rata IKE sebesar 0,5457, realisasi sebesar 0,6380, capaian 116% dengan kategori sangat berhasil. Formulasi perhitungan adalah Jumlah Nilai IKE Desa dibagi jumlah Desa. Jumlah nilai IKE Desa sebesar 35,36 dan jumlah Desa sebesar 328 Desa.

Pada sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa dengan indikator Nilai rata - rata IKL sebesar 0,6638, realisasi sebesar 0,7732, capaian 116% dengan kategori sangat berhasil. Formulasi perhitungan adalah Jumlah Nilai IKL Desa dibagi jumlah Desa. Jumlah nilai IKL Desa sebesar 35,36 dan jumlah Desa sebesar 328 Desa.

Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD 104% dengan kategori berhasil.

2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018 – 2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya, diperoleh matrik sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2023

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata – rata IKS	0,6260	0,7116	0,7235	0,7459	0,7711	-	100%	100%	103%	106%	-
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata – rata IKE	0,4929	0,5311	0,5680	0,6013	0,6380	-	100%	100%	110%	116%	-
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata – rata IKL	0,6364	0,6463	0,6445	0,6836	0,7732	-	100%	100%	103%	116%	-
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip oleh APIP	-	B	BB	A	A	-	100%	102%	103%	104%	-

Sumber Data: Data diolah Oleh Dinas PMD Tahun 2023



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmdbone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa setiap indikator rata – rata capaian diatas target pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2018 – 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

1 Meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa

Indikator : Nilai Rata – rata IKS

Realisasi Tahun 2022 sebesar 0,7711 dengan capaian 106%, Realisasi Tahun 2021 sebesar 0,7459 dan realisasi Tahun 2020 sebesar 0,7235, di lihat dari realisasi dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

2 Meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa

Indikator : Nilai Rata – rata IKE

Realisasi Tahun 2022 sebesar 0,6380 dengan capaian 116%, Realisasi Tahun 2021 sebesar 0,6013 dan realisasi Tahun 2020 sebesar 0,5680, di lihat dari realisasi dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

3 Meningkatkan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi(IKL) Desa

Indikator : Nilai Rata – rata IKL

Realisasi Tahun 2022 sebesar 0,7732 dengan capaian 116%, Realisasi Tahun 2021 sebesar 0,6836 dan realisasi Tahun 2020 sebesar 0,6445, di lihat dari realisasi dari tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.



4 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Utama DPMD

Indikator : Predikat Nilai Sakip oleh APIP

Nilai Sakip Tahun 2021 A (82,46) dan Pada Tahun 2022 A (86,00) dengan capaian sebesar 104 dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

3 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target Jangka Menengah Renstra 2018 -2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja 2022	Capaian
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata – rata IKS	0,7302	0,7711	106%
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata – rata IKE	0,5497	0,6380	116%
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata – rata IKL	0,6658	0,7732	116%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip oleh APIP	B	A	104%

Sumber Data: Data Diolah Oleh Dinas PMD Kab. Bone Tahun 2023

Berdasarkan tabel 3.3 dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja Indikator Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa tahun 2022 sebesar 0,7711 atau 106% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,7302, realisasi kinerja Indikator



Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa tahun 2022 sebesar 0,6380 atau 116% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,5497, realisasi kinerja Indikator Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa tahun 2022 sebesar 0,7732 atau 116% dari target akhir RENSTRA sebesar 0,6658, realisasi kinerja Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD tahun 2022 A dari target akhir RENSTRA sebesar BB. Dengan capaian yang baik pada tahun 2022, diharapkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan pada indikator ini berkelanjutan dan bersinergi.

4

Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2022	Standar Nasional	
				Target 2022	Realisasi 2022
1	Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	-	-	-	-
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKS) Desa	-	-	-	-
3	Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	-	-	-	-
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	-	-	-	-

Sumber Data: *Renstra Dinas PMD Tahun 2018-2023*

Berdasarkan Tabel 3.4 di atas, dijelaskan bahwa Dinas PMD Kab.Bone tidak ada hubungan atau kaitannya dengan realisasi kinerja yang berhubungan dengan standar pelayanan minimal dan standar nasional lainnya.

Perbandingan pencapaian kinerja tujuan/sasaran Dinas PMD Kabupaten Bone dengan Indikator Kinerja Dinas PMD Kabupaten disekitarnya tergambar pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Perbandingan Indikator Kinerja Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja	Kabupaten/Kota	Realisasi 2022	Capaian 2021	Keterangan
1.	Nilai Rata-rata IKS	Bone	0,7711	0,7459	
	Nilai Rata-rata IKE		0,6380	0,6013	
	Nilai Rata-Rata IKL		0,7732	0,6836	
2.	Nilai Rata-rata IKS	Wajo	0,7581	0,7386	
	Nilai Rata-rata IKE		0,6529	0,6130	
	Nilai Rata-Rata IKL		0,6817	0,6620	
3.	Nilai Rata-rata IKS	Sinjai	0,8103	0,7920	
	Nilai Rata-rata IKE		0,6883	0,6614	
	Nilai Rata-Rata IKL		0,7632	0,6975	
4.	Nilai Rata-rata IKS	Maros	0,8033	0,7767	
	Nilai Rata-rata IKE		0,7094	0,6294	
	Nilai Rata-Rata IKL		0,7033	0,6300	

Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa Realisasi Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Nilai Rata-rata IKS sebesar 0,7711, Kab. Wajo sebesar 0,7581, Kab. Sinjai 0,8103 dan Kab. Maros sebesar 0,8033 menunjukkan bahwa Realisasi Nilai Rata-rata IKS Kab. Bone Tahun 2022 dan lebih tinggi 1,30% dibandingkan Kab.Wajo namun lebih



rendah 3,92% dibandingkan dengan Kab. Sinjai dan 3.22% dari Kab. Maros. Adapun Capaian Kab. Bone Tahun 2021 berdasarkan indikator kinerja tujuan/sasaran Nilai Rata-rata IKS sebesar 0,7459 Kab. Wajo sebesar 0,7386, Kab. Sinjai 0,7920 dan Kab. Maros sebesar 0,7767 hal ini menunjukkan capaian Nilai Rata-rata IKS Tahun 2021 Kab. Bone lebih tinggi 0,91% dibandingkan Kab. Wajo namun lebih rendah 4,61% dibandingkan dengan Kab. Sinjai dan 3,08% dari Kab. Maros.

Realisasi Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Nilai Rata-rata IKL sebesar 0,7732 Kab. Wajo sebesar 0,6817, Kab. Sinjai 0,7632 dan Kab. Maros sebesar 0,7033 menunjukkan bahwa Realisasi Nilai Rata-rata IKL Kab. Bone Tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan Kab. Wajo, Kab. Sinjai dan Kab. Maros. Adapun Capaian Kab. Bone Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Nilai Rata-rata IKL sebesar 0,6836 dan Kab. Wajo sebesar 0,6620, Kab. Sinjai 0,6975 dan Kab. Maros sebesar 0,6300 hal ini menunjukkan Capaian Nilai Rata-rata IKL Kab. Bone Tahun 2021 lebih tinggi 2,16% dibandingkan Kab. Wajo dan 5,36% dari Kab. Maros, namun lebih rendah 1,39% dari Kab. Sinjai.

Realisasi Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Nilai Rata-rata IKE sebesar 0,6380 Kab. Wajo sebesar 0,6529, Kab. Sinjai 0,6883 dan Kab. Maros sebesar 0,7094 menunjukkan bahwa Realisasi rata-rata IKE Kab. Bone Tahun 2022 lebih rendah 1,49% dibandingkan Kab. Wajo dan 5,03% dari Kab. Sinjai serta 7,14% dari Kab. Maros. Adapun Capaian Kab. Bone Tahun 2021 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Nilai Rata-rata IKE sebesar 0,6013 dan Kab. Wajo sebesar 0,6130, Kab. Sinjai 0,6614 dan Kab. Maros sebesar 0,6294 hal ini menunjukkan Capaian Nilai Rata-rata IKE Tahun 2021 Kab. Bone lebih rendah 1,17% dibandingkan Kab. Wajo dan 6,01% dari Kab. Sinjai serta 2,81% dari Kab. Maros. Realisasi Tahun 2022 dan Capaian 2021 menunjukkan bahwa Nilai rata-rata IKE Kab. Bone lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten disekitarnya hal ini terjadi karena di Kabupaten lain memiliki 2 jenis wilayah yaitu pesisir dan daratan sedangkan Kabupaten Bone memiliki 3 jenis wilayah yaitu pesisir, pegunungan dan



daratan. Sehingga akses ekonomi di wilayah pegunungan sangat sulit dibandingkan dengan wilayah pesisir dan daratan.

5

Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

Tabel 3.6 Pengukuran Kinerja Keberhasilan dan Kegagalan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				>110 Sangat Berhasil	90= \leq s/d<110 Berhasil	60= \leq s/d<90 Cukup Berhasil	<60 Tidak Berhasil
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa			110%				
	Nilai Rata – rata IKS	106%			√		
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa			110%				
	Nilai Rata – rata IKE	116%		√			
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa			110%				
	Nilai Rata – rata IKL	116%		√			
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD			110%				
	Predikat Sakip oleh APIP	104%			√		
RATA-RATA		110%					

Sumber Data : Data di olah Oleh Dinas PMD Tahun 2023



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmd.bone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



Berdasarkan data pada tabel 3.6 diatas, dapat disimpulkan bahwasecara umum realisasi capaian indikator sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2022 dalam kategori *Berhasil dan Sangat Berhasil*.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut:

1 Meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa

Dari tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatkan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa dengan indikator nilai rata-rata IKS menunjukkan predikat **Berhasil** yang mempunyai nilai capain rata-rata 106%

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Nilai Rata – rata IKS

Definisi: Dalam pengukuran Variabel IKS terdiri dari 4 di mensi yaitu Dimensi Modal Sosial yang yaitu “memiliki solidaritas sosial dan rasa toleransi didalam kehidupan masyarakat, adanya rasa aman bagi masyarakat yang bermukim di desa, memiliki prioritas terhadap kesejahteraan sosial”, Dimensi Kesehatan yaitu “memiliki sarana pelayanan kesehatan yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat desa, adanya keberdayaan masyarakat untuk pemenuhan aspek kesehatan, kepemilikan dan penggunaan jaminan kesehatan oleh masayarakat desa”, Dimensi Pendidikan yaitu “adanya akses ke pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat desa, adanya akses ke pendidikan non formal bagi masyarakat desa, adanya akses bagi masyarakat desa untuk



peningkatan pengetahuan” dan Dimensi Pemukiman yaitu “adanya akses tersediaan air bersih dan listrik tempat tinggal masyarakat desa, memiliki akses dan pengelolaan sanitasi di dalam kehidupan masyarakat sehari – hari, adanya akses masyarakat desa untuk aspek informasi dan komunikasi

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator nilai rata-rata IKS dalam kategori **berhasil**, yaitu tercapai 106% dengan realisasi sebesar 0,7711 dari target 0,7282 hal ini karena:

1. Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh stakeholder terkait



Dokumen Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa Kabupaten Bone Tahun 2022 dapat diakses dengan memindai Kode QR di samping

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Nilai IKS antara lain:

1. Meningkatkan dimensi variabel IKS yaitu di bidang Kesehatan, bidang pendidikan, Modal Sosial dan Permukiman.

2 Meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa

Dari tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa dengan indikator nilai rata-rata IKE menunjukkan predikat **Sangat Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 116%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Nilai Rata-rata IKE

Definisi: Pada Variabel IKE ini diukur melalui Dimensi Ekonomi yaitu Keragaman Produksi Masyarakat Desa, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi serta keterbukaan wilayah.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator nilai rata-rata IKE dalam kategori **sangat berhasil**, yaitu tercapai 116% dengan realisasi sebesar 0,6380 dari target 0,5477 hal ini karena:

1. Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh stakeholder terkait



Dokumen Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa Kabupaten Bone Tahun 2022 dapat diakses dengan memindai Kode QR di samping

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Nilai IKE antara lain:

1. Meningkatkan dimensi variabel IKE yaitu di bidang Ekonomi yang terdiri dari keragaman produksi, perdagangan, akses distribusi dan akses kredit

3

Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi(IKL) Desa

Dari tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa dengan indikator nilai rata-rata IKL menunjukkan predikat **Sangat Berhasil** yang mempunyai nilai capaian rata-rata 116%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Nilai Rata-rata IKL

Definisi: Pada Variabel IKL ini diukur melalui Dimensi Ekologi yaitu Kualitas Lingkungan, Potensi Rawan Bencana dan tanggap bencana.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indikator nilai rata-rata IKL dalam kategori **sangat berhasil**, yaitu Tercapai 116% dengan realisasi sebesar 0,7732 dari target 0,6638 hal ini karena:

1. Adanya sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bone, Pemerintah Desa dan Pendamping Profesional dan seluruh stakeholder terkait



Dokumen Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) Desa Kabupaten Bone Tahun 2022 dapat diakses dengan memindai Kode QR di samping



Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Nilai IKL antara lain:

1. Meningkatkan dimensi variabel IKL yaitu di bidang Lingkungan/Ekologi yang terdiri dari dimensi potensi dan tanggap bencana

4

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Utama DPMD

Dari tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa pencapaian sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD dengan indikator Predikat Nilai Sakip oleh APIP menunjukkan predikat *Berhasil* yang mempunyai nilai capaian rata-rata 104%.

Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

- Predikat Nilai Sakip oleh APIP

Definisi: Evaluasi SAKIP merupakan aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang di temukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bone Tahun 2022 berdasarkan surat tugas Inpektur Kabupaten Bone Nomor 700/704/133/III/2022 tanggal 18 Maret 2022.

Pada tabel ikhtisar capaian kinerja terlihat bahwa, capaian indicator predikat nilai Sakip oleh APIP dalam kategori sangat berhasil, yaitu 104*% dengan realisasi A dari target BB hal ini karena:

Evaluasi terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja



telah dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh APIP.

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan Predikat Nilai SAKIP oleh APIP antara lain:

1. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA, RENJA, PK, dan IKU)
2. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja
3. Melakukan perbaikan terhadap LAKIP/LKj
4. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja
5. Melakukan perbaikan terhadap Pernerapan Kinerja

6 Analisis atau Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan:



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

Tabel 3.7 Efisiensi Sumber Daya Kinerja dan Anggaran

Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		Efisiensi Sumber Daya	
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	%
A	B	C	D	E (d/c x100%)	F	G	H (g/f x 100%)	I
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata – rata IKS	0,7282	0,7711	106%	3,578,296,585	3,543,670,932	99,03	93,42
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata – rata IKE	0,5477	0,6380	116%	1,189,797,204	1,189,737,054	99,99	86,19
Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata – rata IKL	0,6638	0,7732	116%	313,217,630	313,217,630	99,99	86,19
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip oleh APIP	BB	A	104%	9,428,908,924	8,665,667,650	91,90	88,36

Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Kab. Bone Tahun 2023



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmd.bone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator nilai rata-rata IKS dengan capaian kinerja 106% dan capaian anggaran 99,03% menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 98,99% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 93,42%.
2. Indikator nilai rata-rata IKE dengan capaian kinerja 116% dan capaian anggaran 99,99%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 98,99% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 86,19%.
3. Indikator nilai rata-rata IKL dengan capaian kinerja 116% dan capaian anggaran 99,99%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 98,99% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 86,19%.
4. Indikator Predikat Nilai Sakip oleh APIP dengan capaian kinerja 104% dan capaian anggaran 91,90%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 99,98% dan efisien penggunaan sumber daya sebesar 88,36%.

7 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap program/ kegiatan/ Sub Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:



Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Rencana Tindak Lanjut
Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa	Nilai Rata – rata IKS	106%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100	100	100	
			<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	328	328	100	Pembinaan administrasi pemerintahan desa
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	984	984	100	Perbaikan jaringan di Dinas Kominfo
			Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	833	833	100	Bimbingan Teknis aparatur pemerintah desa





LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	141	141	100	Penyelesaian masalah melalui tim khusus
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	1	1	100	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan pemahaman perangkat desa tentang tupoks masing-masing perangkat• Monitoring dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan perlu ditingkatkan• Menciptakan kesadaran bagi pemerintah desa akan pentingnya proses update data profil desa masing-masing dalam aplikasi prodeskel



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmdbone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

			Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	328	328	100	Bimbingan teknis terkait penyusunan asse desa
			Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa dan serta Lomba Desa dan Kelurahan	3	3	100	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman perangkat desa tentang tupoks masing- masing perangkat desa • Monitoring dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan perlu ditingkatkan • Menciptakan kesadaran bag pemerintah desa akan pentingnya evaluasi perkembangan desa dan juga keikutsertaan dalam perlombaan desa sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan





LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

								pemerintah desa itu sendiri
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	100	100	100	
			<i>Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang di berdayakan</i>	100	100	100	



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmdbone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

			Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1	1	100	Meningkatkan Penataan Kelembagaan masyarakat
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	2	100	Meningkatkan frekuensi pendampingan d desa dalam hal penataan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa	Nilai Rata – rata IKE	116%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100	100	100	





LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	yang Baik Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa	100	100	100	
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa	1	1	100	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kegiatan monitoring, evaluasi dan Pembinaan • kajian atau analisis terhadap potensi pengembang usaha BUMDE sebelum menentukan jenis usaha • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia bagi pengurus BUMDES melalui Pelatihan, Bimtek dan Orientasi



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmdbone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

								Lapangan sesuai dengan jenis Usaha yang dikelola BUMDES.
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	100	100	100	
			<i>Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat yang diberdayakan</i>	100	100	100	



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmdbone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	1	100	Peningkatan kapasitas bagi pengurus Posyantek di des
			Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1	1	100	Pembinaan, Monev, Peningkatan Wawasan serta koordinasi sehingga bias terlaksananya Pembinaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam kegiatan ekonom produktif



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmdbone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL) Desa	Nilai Rata – rata IKL	116%	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa	100	100	100	
			<i>Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota	5	5	100	Peningkatan kapasitas bagi aparat pemerintah desa dalam hal pemahaman tupoksi serta memaksimalkan fungsi dan peran para pendamping profesional terutama pendamping lokal desa
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5	5	100	Pendampingan dalam pengembangan kawasan perdesaan



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmdbone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	100	100	100	
			<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Ketetapan Penyampaian Dokumen Administrasi Pemerintahan, Keuangan dan Aset Desa</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	177	177	100	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman perangkat desa tentang tupoks masing- masing perangkat desa • Monitoring dan evaluasi oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan perlu ditingkatkan • Memaksimalkan pendamping profesional harus intensif dalam memberikan





LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

								fasilitasi dalam membuat dokumen perencanaan d desa
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD	Predikat Nilai Sakip oleh APIP	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	600	600	100	
			<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	5	100	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2	2	100	



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmdbone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan Periodik Perangkat Daerah secara Tepat Waktu	100	100	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	100	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	100	



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmd.bone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	12	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	180	180	100	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	625	625	100	
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	200	100	
			<i>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	100	100	100	





LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

			Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Perangkat Daerah</i> Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	100	
			<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah</i>	100	100	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36	36	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100	
			<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik</i>	100	100	100	





LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3	3	100	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	3	100	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4	4	100	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100	



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmd.bone.go.id



Jl. Kawerang No. 2, Manurunge

Berdasarkan tabel 3.8 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1 **Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa**

Indikator 1: Nilai rata-rata IKS

dengan target 0,7282 telah **Berhasil** tercapai sebesar 0,7711 atau tercapai 106%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan:

Program :

- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan :

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa



- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.

2 Meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa

Indikator 2 : Nilai rata-rata IKE

dengan target 0,5477 telah **Sangat Berhasil** tercapai sebesar 0,6380 atau tercapai 116%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

Program :

- Program Administrasi Pemerintahan Desa
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan :

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa



- Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

3 Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi(IKL) Desa

Indikator 3 : Nilai rata-rata IKL

dengan target 0,6638 telah **Sangat Berhasil** tercapai sebesar 0,7732 atau tercapai 116%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

Program :

- Program Peningkatan Kerjasama Desa
- Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan :

- Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa
- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa



Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/ Kota
- Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan
- Sub Kegiatan Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa

4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Utama DPMD

Indikator 4 :Predikat Nilai Sakip oleh APIP

dengan target BB telah **Berhasil** tercapai sebesar A atau tercapai 104%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program/Kegiatan/Sub Kegiatan :

Program :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



Sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Upaya Perbaikan Berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 dengan melalui 7 analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada

beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

1 **Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa**

- a. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa
- b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- d. Melaksanakan kegiatan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- e. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan profil desa
- f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan aset desa
- g. Melaksanakan kegiatan fasilitasi evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan
- h. Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- i. Melaksanakan kegiatan PeningkatanKapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.



2 Meningkatkan Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa

- a. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerjasama antar desa
- b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna
- c. Melaksanakan fasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga

3 Meningkatkan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi(IKL) Desa

- a. Melaksanakan kegiatan fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota
- b. Melaksanakan kegiatan fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan
- c. Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa.

4 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Utama DPMD

- a. Melakukan perbaikan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja (RENSTRA, RENJA, PK, dan IKU)
- b. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Pengukuran Kinerja
- c. Melakukan perbaikan terhadap LAKIP/LKj
- d. Melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan Evaluasi Kinerja
- e. Melakukan perbaikan terhadap Perncapaian Kinerja



B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone Tahun 2022 setelah perubahan sebesar Rp. 14,510,220,343,- (Empat Belas Myliar Lima Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) sebagaimana tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran

Uraian	Jumlah (Rp)		%
	Anggaran	Realisasi	
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sasaran 1. Meningkatnya Indeks Ketahanan Sosial (IKS)			
Program:			
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 3.390.293.545,-	Rp 3.343.017.892,-	98,60%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 188.003.040,-	Rp. 187.941.440,-	99,96%
Sasaran 2. Meningkatnya Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)			
Program:			
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 219.662.500,-	Rp. 219.662.350,-	99,99%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 122,859,650,-	Rp. 122,859,650,-	99,99%



LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

Sasaran 3. Meningkatnya Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL)			
Program:			
Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 186.835.100,-	Rp. 186.835.100,-	100%
Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 126.382.530,-	Rp. 126.382.530,-	100%
Sasaran 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan DPMD			
Program:			
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 9.428.908.924,-	Rp. 8.665.567.650,-	91,90%
Total	Rp. 14.510.220.343,-	Rp. 13,699,481,666,-	

Sumber Data : Data diolah oleh Dinas PMD Kab. Bone Tahun 2023



BAB IV

PENUTUP



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmd.bone.go.id



KESIMPULAN

Rata - rata capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 120* dengan predika tberhasil yang didukung oleh Indeks Ketahanan Sosial sebesar 106% dengan predikat berhasil, Indeks Ketahanan Ekonomi sebesar 116% dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi sebesar 116% dengan predikat sangat berhasil.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja baik Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan/ Ekologi. Pada Indeks Ketahanan Sosial masih kurangnya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah desa dan pendamping sehingga perlu meningkatkan dimensi variabel IKS diantaranya bidang Kesehatan, bidang Pendidikan, modal sosial dan permukiman.

Indeks Ketahanan Ekonomi yang diukur melalui dimensi ekonomi yaitu keragaman produksi masyarakat desa, tersedianya pusat pelayanan perdagangan, logistik Lembaga ekonomi dan keterbukaan wilayah sehingga Kabupaten masih perlu meningkatkan dimensi variabel Indeks Ketahanan Ekonomi.

Indeks Ketahanan Lingkungan yang diukur dari kualitas lingkungan, potensi rawan bencana dan tanggap bencana sehingga Kab. Bone masih perlu meningkatkan dalam tanggap bencana dan selalu mempertahankan kualitas Lingkungannya.



LAMPIRAN



dpmdbonesulsel@gmail.com



dpmd.bone.go.id



A. BAR KODE



Dokumen Peraturan Bupati
No. 78 Tahun 2021



Dokumen Perjanjian
Kinerja Tahun 2022



Dokumen IKS Desa Tahun
2022



Dokumen IKE Desa Tahun
2022



Dokumen IKL Desa Tahun
2022



Dokumen RENJA DPMD
Tahun 2022



Dokumen RENSTRA Tahun
2018-2023



Dokumen Laporan Hasil Evaluasi
SAKIP DPMD Kab. Bone T.A 2021



B. DOKUMENTASI KEGIATAN





LAPORAN KINERJA

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KAB. BONE

